

# Buletin **BSNP**

Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan



## **Revitalisasi Peran BSNP dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional Melalui Pengembangan Standar dan Penyelenggaraan Ujian Nasional yang Kredibel**



**Resensi Buku:**  
**Sekedar Mampu Menggunakan Komputer Saja Tidak Cukup**

**Berita BSNP:**  
**Pengukuhan Anggota BSNP 2014-2018**

*Penanggungjawab:*

**Zainal A. Hasibuan**

*Pemimpin Redaksi:*

**Bambang Suryadi**

*Redaksi Eksekutif:*

**Kiki Yulianti**

**Nanang Arif Guntoro**

**Zaki Su'ud**

**Khomsiyah**

*Redaksi Pelaksana:*

**Teuku Ramli Zakaria**

*Penyunting/Editor:*

**Titi Savitri Prihatiningsih**

**Erika Budiarti Laconi**

**Ipung Yuwono**

**Djoko Luknanto**

*Desain Grafis & Fotografer*

**Arief Rifai Dwiyanto**

**Djuandi**

**Ibar Warsita**

*Sekretaris Redaksi*

**Ning Karningsih**

*Alamat:*

**BADAN STANDAR NASIONAL  
PENDIDIKAN**

Gedung D Lantai 2,

Mandikdasmen

Jl. RS. Fatmawati, Cipete

Jakarta Selatan

Telp. (021) 7668590

Fax. (021) 7668591

Email: [info@bsnp-indonesia.org](mailto:info@bsnp-indonesia.org)

Website: <http://www.bsnp-indonesia.org>

## Pengantar Redaksi

Pembaca yang budiman. Pada edisi ketiga ini, ada hal yang baru dalam Buletin BSNP, yaitu struktur pengelola Buletin BSNP. Perubahan struktur ini menyesuaikan dengan adanya perubahan struktur anggota BSNP periode 2014-2018. Sebagaimana telah kita ketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengukuhkan anggota BSNP periode 2014-2018 pada tanggal 14 Agustus 2014. Selain itu, kami juga menyajikan artikel tentang peran BSNP dalam peningkatan mutu pendidikan melalui revitalisasi pelaksanaan Ujian Nasional. Kegiatan BSNP lainnya kami sajikan dalam bentuk berita dan lensa BSNP. Selamat membaca!

## Daftar Isi

**3- 8**

**Revitalisasi Peran BSNP dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional Melalui Pengembangan Standar dan Penyelenggaraan Ujian Nasional yang Kredibel**

**9- 11**

**Resensi Buku:**

**Sekadar mampu Menggunakan Komputer Saja Tidak Cukup**

**12- 15**

**Berita BSNP:**

- Pengukuhan Anggota BSNP 2014-2018
- Penilaian Buku Teks Pelajaran Kelompok Peminatan
- BSNP Lakukan Validasi Draf Standar Nasional Pendidikan di 12 Provinsi
- Implementasi Kurikulum 2013
- Ucapan Terima kasih

**16- 20**

**Lensa BSNP**

## Keterangan Gambar Cover

Anggota BSNP periode 2014-2018 berpose bersama setelah dikukuhkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Agustus 2014. Dari kiri ke kanan, Nanang Arif Guntoro, Ipung Yuwono, Bambang Suryadi, Kiki Yulianti, Erika Budiarti Laconi, Rr. Titi Savitri Prihatiningsih, Khomsiyah, Teuku Ramli Zakaria, Zaki Su'ud, Zainal A. Hasibuan, dan Djoko Luknanto (Foto atas). Mohammad Nuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membacakan teks pengukuhan anggota BSNP periode 2014-2018 di Graha Ki Hajar Dewantara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (14/8/2014) (Foto bawah).

# REVITALISASI PERAN BSNP DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL MELALUI PENGEMBANGAN STANDAR DAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL YANG KREDIBEL

Bambang Suryadi<sup>1</sup>

## PENDAHULUAN

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 73 ayat (1), pemerintah membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang merupakan lembaga mandiri, profesional dan independen. BSNP sebagai suatu organisasi yang mandiri dan independen secara akademis bebas dari pengaruh birokrasi pemerintah. Keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh BSNP merupakan kebijakan yang bersifat independen. Sedangkan prinsip profesional menggambarkan bahwa BSNP dalam menjalankan tugas dan kewajibannya senantiasa berorientasi kepada produk yang bermutu (BSNP, 2011).

Sebagai lembaga yang independen dan profesional, BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BSNP memiliki wewenang: (a) mengembangkan standar nasional pendidikan, (b) menyelenggarakan ujian nasional, (c) memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, (d) merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan (e) menilai kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaan buku teks



pelajaran.

Dari lima kewenangan tersebut, tugas yang paling berat dan berdampak luas baik secara politik, sosial, moral, maupun kultural adalah penyelenggaraan ujian nasional. Sejak tahun 2005 sampai 2013, dimana BSNP terlibat dalam penyelenggaraan UN, penyelenggaraan UN tahun 2013 merupakan penyelenggaraan UN yang terburuk tidak hanya dalam jejak rekam BSNP, tetapi juga dalam sejarah pendidikan nasional.

Dalam konteks pendidikan nasional, UN merupakan amat undang-undang dan sub sistem pendidikan yang berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong peserta didik dan pendidik meningkatkan semangat belajar dan mengajar, yang pada akhirnya akan bermuara pada mutu kompetensi lulusan. Dengan demikian, saat ini tidak lagi relevan untuk memperbincangkan perlu tidaknya UN dilaksanakan, tetapi isu yang lebih stra-

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Sekretaris BSNP.

tegis untuk diperbincangkan adalah bagaimana meningkatkan kredibilitas, akseptabilitas, dan kualitas penyelenggaraan UN melalui perbaikan lembaga penyelenggaraan, metode, manajemen, dan teknologi penyelenggaraan UN.

Berdasarkan latar belakang tersebut, revitalisasi peran BSNP dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui penyelenggaraan UN mutlak dilakukan. Tanpa adanya revitalisasi peran BSNP, masyarakat akan memandang UN hanya sebagai proyek pemerintah dengan biaya tinggi tetapi hasilnya UN tidak kredibel.

## ANALISIS TERHADAP PERAN BSNP

Dalam melakukan analisis terhadap peran BSNP, penulis hanya membatasi pada dua aspek, yaitu pengembangan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan penyelenggaraan UN. Dua hal ini penulis anggap sangat krusial dan signifikan. Sedangkan dua peran BSNP lainnya, yaitu pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan serta peran BSNP dalam penilaian buku teks pelajaran, tidak penulis analisis mengingat terbatasnya halaman yang disediakan.

### a. Pengembangan SNP

Pengembangan SNP untuk pendidikan dasar dan menengah dimulai tahun 2005 dan telah selesai pada tahun 2009. Daftar SNP yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) dapat diakses dan diunduh di website resmi BSNP (<http://www.bsnp-indonesia.org>). Pada tahun 2010 dan 2011 BSNP mulai mengembangkan SNP untuk pendidikan tinggi. Dalam hal ini, BSNP telah menyelesaikan pengembangan draf Standar nasional pendidikan untuk pendidikan tinggi dan merekomendasikan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemantauan implementasi SNP untuk pendidikan dasar dan menengah telah dilaksanakan pada tahun 2012 dan penyempurnaan standar dilakukan pada tahun 2013.

SNP yang dikembangkan BSNP sangat strategis untuk mening-

katkan mutu pendidikan nasional. Mengapa sangat strategis? Minimal ada dua alasan yang bisa penulis kemukakan di sini. Pertama, standar yang dikembangkan BSNP mengikat satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Konsekuensi logis dari standar ini adalah pemerintah, secara bertahap, berkewajiban memenuhi standar tersebut melalui kebijakan perencanaan dan penganggaran pendidikan nasional. Kedua, SNP yang dikembangkan BSNP dijadikan acuan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) dalam mengembangkan instrumen akreditasi.

Meskipun BSNP telah selesai mengembangkan SNP, namun pada tataran empiris, masih banyak satuan pendidikan yang belum mengetahui produk BSNP tersebut. Hal ini karena sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh BSNP, Direktorat terkait, dan Pemerintah Daerah masih sangat terbatas. Media komunikasi yang dimiliki BSNP dalam bentuk Website dan Buletin, masih kurang efektif.

### b. Penyelenggaraan UN

Menurut hemat penulis, semenjak BSNP menyelenggarakan UN pada tahun 2005 sampai 2013, ada dua catatan penting. Pertama, penyelenggaraan UN tahun 2005 berakhir dengan adanya gugatan oleh Tim Advokasi Korban Ujian Nasional (TEKUN). Perkara ini bermula dari "citizen law suit" atau gugatan warga negara yang diajukan oleh Kristiono dan kawan-kawan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua BSNP yang dinilai lalai memenuhi perlindungan hak asasi manusia (HAM) di bidang pendidikan (Suryadi, 2010).

Singkat cerita, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst Tanggal 21 Mei 2007 menolak gugatan primer dan menerima gugatan subsider. Para tergugat mengajukan banding dan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan Nomor 377/PDT/2007/PT.DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para tergugat akhirnya mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Dalam putusannya Nomor 2596 K/PDT/2008, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terduga, yang diputus pada tanggal 14 September 2014. Namun, dalam putusan tersebut tidak ada larangan bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan UN. Oleh sebab itu UN tetap dilaksanakan sampai sekarang. Permasalahan tidak berhenti di sini. Dengan ditolaknya kasasi oleh MA, DPR membentuk Panitia Kerja (PANJA) UN.

Kedua, penyelenggaraan UN 2013 merupakan penyelenggaraan yang terburuk dalam sejarah pendidikan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus, diantaranya (a) terjadinya dugaan keboboran soal ujian serta disinyalir adanya bocoran jawaban, (b) terlambatnya distribusi soal sampai ke satuan pendidikan, (c) tertukarnya sejumlah soal UN atau kurangnya jumlah naskah UN yang diterima satuan pendidikan, (d) tertukarnya naskah UN antar daerah atau wilayah, (e) Lembar Jawaban yang tipis dan tidak dapat dipindai, dan (f) khusus untuk UN SMA/MA dan SMK, ada 11 provinsi di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur yang pelaksanaan UN-nya ditunda karena naskah soal UN terlambat didistribusikan (Suryadi, 2013).

Dari pelaksanaan UN yang oleh sebagian orang disebut "Tsunami UN 2013", muncul beberapa tindak lanjut. Pertama, telah dibentuk tim investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud dan audit oleh BPK. Kedua, Komisi X DPR-RI dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 26 April 2013 mempertanyakan keabsahan pelaksanaan dan keabsahan hasil UN SMA sederajat.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan UN dengan sistem penilaian yang selama ini diterapkan sangat kompleks dan riskan. Oleh sebab itu perlu dilakukan revitalisasi peran BSNP dalam penyelenggaraan UN.

### REVITALISASI PERAN BSNP

Pada bagian ini penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran untuk perbaikan penyelenggaraan UN di masa

mendatang ditinjau dari empat aspek yaitu lembaga penyelenggara, metode, manajemen, dan teknologi.

#### 1. Lembaga penyelenggara

Secara legal formal BSNP memang sebagai penyelenggara UN, namun secara sumber daya (*resources*) baik biaya dan tenaga, BSNP tidak memilikinya sehingga semua tergantung pada institusi lain di luar BSNP. Kondisi semacam inilah yang akan menyulitkan anggota BSNP pada tahun-tahun yang akan datang, jika UN masih diselenggarakan oleh BSNP yang hanya beranggotakan 15 orang. Dengan keterbatasan anggota, jika BSNP masih menjadi pelaksana UN, maka di satu sisi permasalahan UN tidak akan selesai dan di sisi lain pengembangan dan monitoring standar nasional pendidikan juga tidak akan optimal karena tenaga, pikiran, dan energi yang ada terkuras untuk UN.

Mengingat keterbatasan tenaga yang menangani UN, alternatif pertama adalah peran BSNP ke depan lebih tepat sebagai *examination council* bukan sebagai pelaksana. Sebagai *examination council* wewenang BSNP dalam UN bukan sebagai pelaksana seperti sekarang ini tetapi sebagai penyelenggara yang memiliki otoritas penuh. Diantara tugasnya adalah menentukan standar kelulusan dan mutu soal. Keberadaan BSNP juga perlu diperkuat dengan membentuk lembaga didaerah-daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dengan demikian tenaga, pikiran, dan waktu anggota BSNP tidak terkuras untuk UN saja tapi untuk pendidikan nasional secara menyeluruh atau komprehensif.

Alternatif kedua, untuk perbaikan UN ke depan penyelenggaraan UN sebaiknya diserahkan kepada lembaga independen (selain BSNP) tetapi tetap di bawah kendali Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang ada di Malaysia (*Malaysian Examination Council*) atau Hong Kong (*Hong Kong Examination and Assessment Authority*). Independensi disini diartikan bahwa lembaga tersebut

tetap independen terhadap pihak yang berkepentingan dengan ujian, misalnya dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, direktorat pembinaan SMP, SMA, dan SMK atau yang sederajat. Dengan pengertian lain independen dari segi profesionalisme, tetapi tidak independen dari segi organisasi dan penganggaran. Pilihan kedua ini memiliki konsekuensi dilakukannya revisi PP 19/2005.

## 2. Metode Ujian

Selama ini metode skoring hasil UN dilakukan dengan rentang nilai 1 sampai dengan 10 untuk semua mata pelajaran yang diujikan dengan jumlah soal 40 atau 50 item. Metode seperti ini sama dengan cara penulisan rapor hasil belajar yang memiliki asosiasi 10 proporsi. Jika ada murid mendapat jawaban benar sebanyak 20 dari 40 soal, maka nilainya adalah  $20/40 \times 10$  sama dengan 5. Artinya metode skoring yang ada tidak memperhatikan tingkat kesulitan soal karena hanya mempertimbangkan jumlah item yang benar. Semestinya skoring dilakukan dengan membedakan item yang mudah, sedang, dan sulit. Jawaban yang benar untuk item yang sulit harus diberi bobot yang lebih tinggi daripada jawaban yang benar untuk item yang mudah.

Selain itu, metode penilaian yang diterapkan sekarang ini memiliki dua kekurangan. Pertama nilai yang ada tidak komparabel (*comparable*) antara paket satu dengan paket yang lain, antar sekolah/madrasah, antar kabupaten/kota bahkan antar provinsi. Kedua, nilai tersebut juga tidak komparabel antar tahun ke tahun. Sulit untuk membandingkan kelulusan tahun 2011 misalnya dengan kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Seorang murid yang memiliki rata-rata nilai 7 untuk semua mata pelajaran yang diujikan pada tahun 2011, belum tentu memiliki kompetensi yang sama dengan murid yang memperoleh rata-rata nilai yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena nilai tersebut tidak komparabel. Jika nilai yang ada tidak komparabel, maka hasil analisis yang ada tidak dapat dijadikan

acuan dalam membuat kebijakan.

Untuk ke depan semestinya rentang skor nilai dibuat dari 1 sampai dengan 100 atau 1 sampai dengan 500. Untuk melakukan metode seperti ini diperlukan konversi nilai. Sistem konversi nilai ini ditetapkan oleh BSNP dan tidak harus diketahui oleh semua pihak, tetapi hasilnya dapat dipercaya dan menggambarkan kemampuan peserta ujian. Hal ini telah dilakukan dalam metode ujian TOEFL. Skor yang diperoleh oleh peserta ujian TOEFL benar-benar menggambarkan kompetensi yang dimiliki dan dapat diterima secara internasional.

## 3. Manajemen

Bagian manajemen yang sangat penting adalah masalah anggaran pembiayaan ujian. Selama ini ujian dibiayai oleh negara melalui APBN. Unit cost untuk setiap peserta adalah Rp. 50.000. Sebagai ilustrasi jumlah peserta UN tahun pelajaran 2010/2011 sebanyak 10.660.312 peserta dari 234.342 sekolah/madrasah untuk seluruh jenjang (BSNP, 2011).

Dengan jumlah tersebut jika unit cost setiap siswa adalah Rp. 50.000 maka total biaya UN tahun 2010/2011 adalah Rp. 533.015.600.000. Biaya ini dimanfaatkan untuk keperluan administrasi, pencetakan bahan ujian, distribusi, monitoring, pengawasan, dan pelaporan.

Penganggaran UN melalui APBN cenderung kepada pelaksanaan yang bersifat proyek. Akibatnya penentuan pencetakan bahan ujian harus melalui tender yang nota bene proses tender juga banyak yang bermasalah. Lebih parah lagi dengan sistem penganggaran UN melalui APBN, penyelenggara UN menjadi bersifat struktural, mulai dari penyelenggara tingkat pusat sampai ke tingkat provinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan. Kondisi kerja seperti ini tidak kondusif karena hanya bagi-bagi tugas dan wewenang yang pada akhirnya berimplikasi pada alokasi keuangan.

Karena biaya ujian masih disubsidi oleh pemerintah, maka pemerintah menanggung biaya untuk semua peserta ujian. Sangat tidak adil jika murid yang mampu disamakan

dengan murid yang tidak mampu dengan diberikannya subsidi dari pemerintah. Akibatnya pemerintah mengeluarkan biaya yang sangat besar sementara hasilnya masih dipertanyakan karena tidak obyektif dan kredibel.

Untuk perbaikan ke depan, semestinya pemerintah tidak perlu memberi subsidi kepada semua peserta ujian. Biaya ujian ditanggung oleh masing-masing peserta. Jika ada peserta yang tidak mampu, pemerintah wajib memberikan subsidi. Jika unit cost per peserta Rp. 50.000, dalam pandangan penulis, biaya tersebut tidak memberatkan peserta ujian. Fakta yang ada murid-murid sekarang masih mampu membeli pulsa Rp. 50.000 setiap bulan. Manfaat yang dapat dirasakan dengan cara seperti ini pemerintah dapat melakukan efisiensi dana yang luar biasa dan dana tersebut dapat dipergunakan untuk peningkatan mutu guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta beasiswa pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, secara psikologis karena peserta ujian membiayai dirinya sendiri, dapat dipastikan mereka akan lebih sungguh-sungguh dalam belajar untuk dapat lulus UN.

#### 4. Teknologi

Saat ini UN diselenggarakan secara manual dengan bentuk *pencil test*. Dengan cara ini, seluruh peserta ujian mengikuti ujian pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk materi ujian yang diujikan. Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke dengan perbedaan waktu sampai dua jam antara Indonesia bagian timur dan bagian barat, maka cara seperti ini sangat memberi peluang terjadinya kebocoran soal. Apalagi dengan kecanggihan alat telekomunikasi seperti sekarang ini, informasi dapat dikirimkan dalam waktu yang sangat cepat. Tidak mustahil seorang peserta UN di wilayah timur dapat memberikan informasi kepada rekan atau kerabatnya di wilayah barat tentang soal yang diujikan.

BSNP telah mengantisipasi masalah tersebut di atas dengan

menggunakan sistem paket. Pada tahun 2011 dan 2012 di setiap kelas diberlakukan lima paket yang berbeda. Sedangkan pada tahun 2013 ada 20 paket soal. Sebelum itu hanya dua paket saja untuk setiap ruang ujian. Namun jumlah paket ini tidak menutup peluang untuk melakukan kecurangan dengan memberikan kunci jawaban lewat SMS. Ketika masih ada dua paket soal ujian, kunci jawaban cukup diberikan kode paket, nomor soal dan jawabannya. Namun ketika jumlah paket menjadi lima dan dua puluh paket, kunci jawaban dilengkapi dengan kata-kata awal dari setiap soal sebagai *clue* soal.

Jika cara konvensional seperti ini masih dipertahankan, maka sampai kapanpun kecurangan dalam UN tidak dapat dihindari. Karena itu untuk perbaikan ke depan diperlukan sebuah teknologi khusus. Teknologi dimaksud adalah teknologi yang mengarah kepada teknologi yang efektif, efisien, dan ekonomis. Salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah *Computerized Adaptive Testing* (CAT). CAT adalah suatu bentuk tes berbasis komputer yang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta ujian itu. CAT juga disebut pengujian disesuaikan. Metode yang dipakai dalam proses CAT adalah menggunakan *Model Item Response Theory* (IRT).

CAT memiliki beberapa kelebihan. Dalam CAT, peserta ujian menerima soal yang berbeda namun memiliki tingkat kesulitan yang sama sehingga hasilnya bersifat komparabel. Dengan teknologi CAT peserta ujian mengerjakan ujian tidak pada hari dan jam yang sama. Artinya mereka bisa mengikuti ujian pada hari dan jam yang berbeda sesuai dengan kesiapan masing-masing peserta. Untuk mengikuti ujian siswa cukup duduk di depan komputer yang sudah tersambung dengan internet. Kemudian mengakses situs tertentu yang telah ditetapkan dan mengikuti petunjuk yang disediakan, misalnya cara mengisi biodata, memilih paket soal, dan menjawab soal ujian. Skor tes juga dapat langsung diperoleh.

Dengan menerapkan model CAT

tersebut akan terjadi efisiensi waktu bagi peserta ujian dan penyelenggara ujian. Yang lebih penting lagi, dengan cara seperti ini, kecurangan atau kebocoran soal dapat ditekan serendah-rendahnya sampai pada *zero level*. Untuk menerapkan sistem CAT ada kondisi tertentu yang perlu dipenuhi. Diantaranya adalah adanya komputer dan infrastruktur jaringan yang memadai (sekolah atau peserta didik) serta ketersediaan bank soal yang banyak, variatif, dan bagus karena sudah terkalibrasi. Sehingga didapatkan jumlah item, isi, dan tingkat kesulitan soal yang berbeda untuk setiap peserta ujian.

Selain kelebihan tersebut, tidak dipungkiri CAT memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya adalah biaya persiapan (pengadaan infrastruktur) yang relatif lebih mahal dan terbatas pada peserta yang sudah familiar dengan komputer. Selain itu adalah masalah kalibrasi dari item soal. Untuk melakukan kalibrasi dan dalam rangka untuk mendapatkan item soal yang bagus, semua item tes harus diujicobakan kepada sampel yang cukup besar dan kemudian dianalisa. Untuk melakukan hal ini tentu diperlukan anggaran atau biaya yang tinggi. Artinya, pemerintah perlu melakukan investasi untuk mengkondisikan kejujuran kepada peserta didik dan meningkatkan kredibilitas hasil UN. Sebelum CAT diterapkan, BSNP dapat melakukan Computer Based Test (CBT) secara bertahap untuk menggantikan Paper Based Test (PBT).

## KESIMPULAN DAN SARAN

BSNP telah berhasil dalam melaksanakan tugas pengembangan standar nasional pendidikan. Namun demikian standar yang dihasilkan masih belum diimplementasikan secara optimal. Karena itu perlu ada cara dan strategi yang efektif dari BSNP dan seluruh pemangku kepentingan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan, diantaranya adalah sosialisasi standar secara intens.

Penilaian merupakan subsistem pendidikan nasional dan UN merupakan instrumen penilaian. Maju mundurnya mutu pendidikan banyak ditentukan oleh baik buruknya sistem

penilaian. Sistem penyelenggaraan UN perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk memberikan hasil yang objektif, kredibel, dan akuntabel. Alternatif pertama, BSNP berperan sebagai *examination council* dalam penyelenggaraan UN. Alternatif kedua, tugas penyelenggaraan UN dikeluarkan dari wewenang BSNP dan ditangani oleh lembaga atau badan yang mandiri, independen, dan profesional selain BSNP, sehingga BSNP fokus dalam menangani SNP dan buku teks pelajaran. Saran ini memiliki konsekuensi pada perubahan PP 19/2005 tentang wewenang BSNP. Sebelum revisi PP tersebut dilakukan, maka BSNP perlu diberi wewenang penuh dalam penyelenggaraan UN, termasuk dibentuknya BSNP di daerah-daerah sesuai dengan amanat UU No. 20/2003. Dengan demikian jika terjadi apa-apa, ada pihak yang bertanggung jawab.

Diperlukan keberanian dalam mengambil kebijakan dan investasi untuk melakukan revitalisasi peran BSNP dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui perbaikan lembaga penyelenggara, metode, manajemen, dan teknologi pelaksanaan UN. Tanpa kebijakan yang strategis, permasalahan UN akan tetap muncul dan tidak akan terselesaikan secara tuntas.

## Referensi

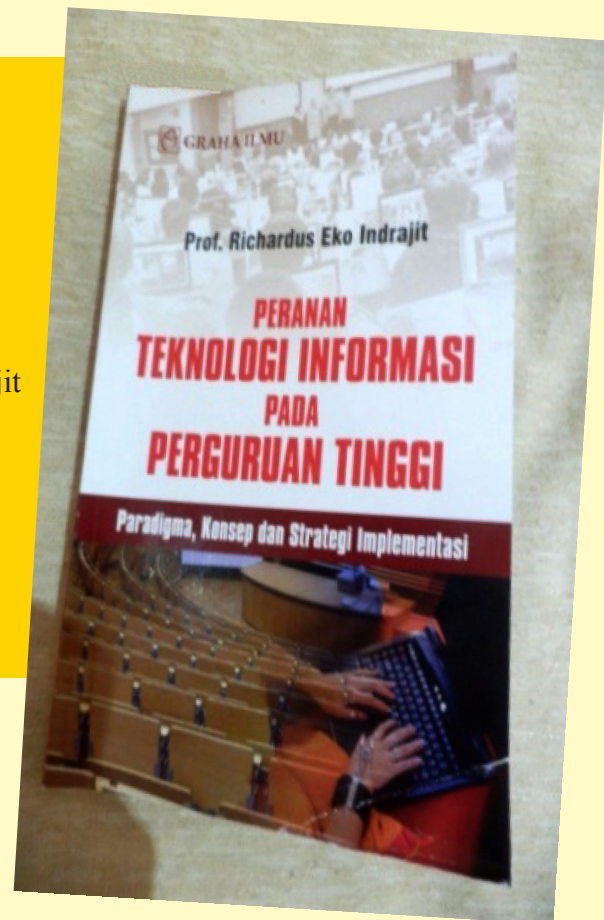
- Badan Standar Nasional Pendidikan (2011). *Laporan Tahunan BSNP*. Jakarta:BSNP.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Suryadi, Bambang. (2010). Penyelenggaraan UN 2010. Titik Terang dari Putusan MA, Panja DPR-RI, dan BSNP. *Buletin BSNP*. Vol. V/No.1/ Maret 2010.
- Suryadi, Bambang. (2013). Evaluasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2013. *Prosiding Konferensi Ilmiah Nasional Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) di Manado*, 20- 21 September 2013. (ISBN. 978- 602- 96343- 1- 0). ●



# Sekedar Mampu Menggunakan Komputer Saja Tidak Cukup

Bambang Suryadi\*

Judul : Peranan Teknologi Informasi Pada Perguruan Tinggi: Paradigma, Konsep, dan Strategi Implementasi.  
 Penulis : Prof. Dr. Richardus Eko Indrajit  
 Penerbit : Graha Ilmu Yogyakarta  
 ISBN : 978-602-262-236-9  
 Jumlah Halaman : 295 halaman



Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pendidikan tinggi pada abad 21 merupakan sebuah keharusan. Selain sebagai tuntutan zaman, penggunaan TIK tersebut juga merupakan cara untuk meningkatkan mutu lulusan, yaitu lulusan yang profesional, kompeten, dan memiliki daya saing baik dalam kancah nasional maupun internasional. Menurut UNESCO, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang selama ini tak terpenuhi.

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ssekretaris BSNP.

Beberapa hasil penelitian, sebagaimana dituliskan oleh penulis buku yang menjadi anggota BSNP periode 2009-2013 ini dalam kata pengantarnya, menunjukkan bahwa sesungguhnya sektor pendidikan adalah industri yang paling pertama dan utama mengalami proses transformasi akibat kemajuan dan perkembangan teknologi informasi. Kenyataan ini bukan semata-mata karena sejarahnya internet berasal dari dunia perguruan tinggi, namun karena hampir semua sumber daya pendidikan telah berhasil didigitalisasi, seperti: konten, gambar, audio, dan video yang terkait secara langsung dengan kegiatan belajar mengajar.

Menyadari pentingnya peran TIK dalam pendidikan tinggi, maka pengembangan materi dan buku referensi di perguruan tinggi merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pakar TIK untuk berkarya. Salah satu karya yang perlu diapresiasi adalah buku "Peranan Teknologi Informasi Pada Perguruan Tinggi: Paradigma, Konsep, dan Strategi Implementasi" yang ditulis oleh Richardus Eko Indrajit, Guru Besar ilmu komputer di ABFI Institute Perbanas.

Melalui buku ini, penulis yang juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) se-Indonesia, bermaksud meyakinkan kepada khalayak ramai bahwa kehadiran teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan telah merubah pola pikir dan perilaku individu serta masyarakat dalam melakukan proses pembelajaran. Sumber daya pembelajaran yang dahulu hanya berada dalam sekat-sekat lembaga pendidikan formal, kini telah tersedia luas tak terbatas dan bebas diakses oleh siapa saja, dari mana saja kapan saja, dan menggunakan apa saja. Keberadaan internet yang menghubungkan titik-titik sumber materi dan pusat pembelajaran telah mengakibatkan terjadinya transformasi besar di dunia pendidikan.

Buku yang terbit pada pertengahan tahun 2014 ini, terdiri atas 11 bab atau bagian. Bab pertama membahas tentang peranan strategis TIK dalam dunia pendidikan dan bab kedua mengulas tentang konteks TIK dalam pendidikan tinggi. Kerangka arsitektur sistem TIK dalam kampus dan pengukuran kinerja

TIK di perguruan tinggi dipaparkan di bab tiga dan empat. Bab lima membahas tentang manajemen tatakelola TIK di perguruan tinggi, dilanjutkan dengan E-literacy: menanamkan budaya pemanfaatan TIK di kampus pada bab enam.

Salah satu judul yang penting adalah pembahasan tentang teknologi informasi dan paradigma pendidikan abad XXI di bab tujuh. Fenomena *Open-Courseware* dan kekayaan konten di internet serta inisiatif konsep *Open Education* dan tantangannya, diulas tuntas di bab delapan dan sembilan. Dua bab terakhir, yaitu bab sepuluh dan sebelas mengulas tentang instrumen evaluasi adopsi teknologi informasi dan implementasi *E-Learning*.

Buku ini perlu dimiliki oleh para akademisi, praktisi, dan profesional yang berkecimpung dalam bidang TIK, khususnya sivitas akademika perguruan tinggi. Dengan membaca buku ini, mereka dapat memahami dampak perkembangan teknologi informasi pada dunia pendidikan. Selain itu, bagi masyarakat modern, kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan TIK demi peningkatan kualitas pembelajaran sudah merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan di perguruan tinggi harus berusaha dan berjuang keras membekali dirinya dengan kemampuan menggunakan TIK.

Apa yang harus dikuasai? Menurut penulis yang dilahirkan di Jakarta, tanggal 24 Januari 1969 ini, berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi era global, paling tidak terdapat dua domain utama yang harus dikuasai bangsa Indonesia. Pertama adalah penggunaan piranti komputasi dan komunikasi yang berkembang saat ini. Yang dimaksud adalah tidak sekedar mampu menggunakan dan mengoperasikan komputer dan/atau notebook semata, namun lebih jauh dapat memakai piranti lain seperti handphone, *personal digital assistant* (PDA), *smart phone*, dan lain sebagainya.

Domain kedua adalah pemanfaatan aplikasi standar penunjang pendidikan. Maksudnya, setelah menguasai cara-cara mengoperasikan piranti digital, hal berikutnya yang harus dikuasai individu pembelajar adalah menggunakan beragam aplikasi standar penunjang pendidikan.



## PENGUKUHAN ANGGOTA BSNP 2014-2018

Mohammad Nuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengukuhkan sebelas orang anggota BSNP periode 2014-2018 di Graha Ki Hajar Dewantara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (14/8/2014).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengukuhkan sebelas orang anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) periode 2014-2018 pada hari Kamis (14/8/2014) di Jakarta. Mereka akan menggantikan anggota BSNP periode 2009-2013 yang telah habis masa jabatannya. Pada kesempatan tersebut, Mohammad Nuh juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para anggota BSNP periode sebelumnya serta mengapresiasi dedikasi dan prestasi mereka dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

Adapun nama-nama kesebelas orang anggota BSNP periode 2014-2018 tersebut adalah Kiki Yulianti (UNSRI), Bambang Suryadi (UIN Jakarta), Nanang Arif Guntoro (UNJ), Zaki Su'ud (ITB), Zainal Arifin Hasibuan (UI), Khomsiyah (USAKTI), Rr. Titi Savitri Prihatiningsih (UGM), Teuku Ramli Zakaria (UIN Jakarta), Erika Budiarti Laconi (IPB), Ipung Yuwono (UM), dan Djoko Luknanto (UGM).

Dalam sambutannya, Mohammad Nuh mengingatkan pentingnya standar nasional pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan.

"Tanpa standar, sulit bagi kita untuk membandingkan posisi kualitas pendidikan nasional dengan negara lain", ucapnya seraya menambahkan BSNP memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan

pemantauan implementasi standar nasional pendidikan.

Selain itu, Mohammad Nuh juga berpesan supaya BSNP mengembangkan sistem penilaian dan evaluasi untuk Kurikulum 2013. Sebagaimana kita ketahui, salah satu warisan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kurikulum 2013. Dalam kurikulum ini, salah satu perbedaan yang mendasar adalah adanya perubahan dari *content based learning* kepada *activity based learning* dan dari *teacher centered learning* kepada *student centered learning*. Dengan karakteristik seperti ini, tentu diperlukan sistem penilaian dan evaluasi yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya.

Secara terpisah, Musliar Kasim Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan berpesan kepada anggota BSNP periode 2014-2018, bahwa implementasi Kurikulum 2013 perlu didukung oleh semua lapisan masyarakat dan kementerian, termasuk BSNP.

"Perubahan kurikulum 2013 ini sangat drastis. Bukan ditambal-tambal, tapi, ibarat sebuah bangunan, fondasi yang ada dirobohkan dan digali lagi kemudian dibangun sesuatu yang baru. Oleh sebab itu, kita perlu mendalami dan mengawal bersama implementasi Kurikulum 2013", pesannya dalam pertemuan dengan anggota BSNP di Jakarta (26/8/2014). ●

\* Bambang Suryadi

## PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN KELOMPOK PEMINATAN

Salah satu tugas BSNP adalah menelaah dan/atau menilai buku teks pelajaran dari segi kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan. Dalam melakukan penilaian buku, BSNP bekerjasama dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, BSNP merekomendasikan hasil penilaian buku kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan sebagai buku teks pelajaran.

Penilaian buk teks pelajaran, tambah Ramon, dilakukan dengan suatu mekanisme yang ditetapkan BSNP dan mengacu pada instrumen penilaian buku teks pelajaran.

Kegiatan verifikasi hasil penilaian buku-buku kelompok peminatan untuk kelas XI dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan 20 September 2014 di Puskurbuk.

Sementara itu, Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP menyoroti masalah keterlambatan distri-



“Kelayakan isi, bahasa penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”, ucap Ramon Mohandas Kepala Puskurbuk dalam rapat koordinasi di BSNP (2/9/2014) di ruang rapat BSNP.

Menurut Ramon, pendaftaran dari penerbit tentang buku teks pelajaran untuk kelompok peminatan telah dimulai dari tanggal 30 Juni 2014 untuk kelas XI dan dari tanggal 25 sampai dengan 27 Agustus 2104 untuk kelas XII.

busi buku teks pelajaran. “Isu yang diungkap media massa baik cetak maupun tulis adalah masalah keterlambatan pencetakan dan distribusi buku teks pelajaran. Banyak sekolah/madrasah yang belum menerima buku teks pelajaran”, ungkapnya.

Oleh sebab itu, tambah Pak Ucok—panggilan akrab beliau—BSNP bersama Puskurbuk perlu mencari solusi untuk menangani masalah ini. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan mengunggah buku-buku tersebut ke dalam internet sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum. ●

Suasana penilaian buku teks pelajaran untuk Kurikulum 2013 oleh tim penilai. Penilaian dilakukan terhadap kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan.

## BSNP LAKUKAN VALIDASI DRAF STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI 12 PROVINSI



Sebagian peserta validasi dan panitia dari Dinas Pendidikan Provinsi NTT berpose bersama tim ahli dan anggota BSNP.

**B**SNP telah melaksanakan validasi draf standar nasional pendidikan dan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan di dua belas provinsi pada bulan Agustus 2014. Tujuan kegiatan validasi ini adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait dengan kesesuaian dan keterbacaan draf standar yang telah dikembangkan oleh tim ahli BSNP.

Berdasarkan panduan kegiatan validasi, kegiatan validasi dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dari tanggal 17-19 Agustus 2014 di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bangka Belitung. Sedangkan kegiatan validasi kedua dilaksanakan dari tanggal 22-24 Agustus 2014 di Bali, NTT, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Papua.

Dalam pelaksanaan validasi ini BSNP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Di masing-masing provinsi kegiatan ini melibatkan sembilan puluh responden sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh tim

ahli untuk setiap standar.

“Pada tahun ini ada lima standar yang divalidasi, yaitu standar pendidikan jarak jauh, standar pendidikan anak usia dini, standar pendidikan guru, standar akademi komunitas, dan standar pendidikan khusus dan layanan khusus. Selain lima standar tersebut, juga dilaksanakan validasi instrumen evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan yang meliputi standar sarana dan prasarana, standar pendidik, dan standar pembiayaan”, ucap Teuku Ramli Zakaria Sekretaris BSNP periode 2009-20013 yang ditetapkan kembali menjadi anggota BSNP periode 2014-2018.

Kegiatan validasi ini, tambah Ramli, merupakan tahapan kegiatan kelima dari sepuluh tahapan kegiatan pengembangan standar. Tahapan berikutnya adalah penyempurnaan draf akhir standar berdasarkan hasil validasi, pengembangan instrument uji publik, uji publik, finalisasi draf standar, dan penyusunan rekomendasi. ●

## IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Pendidikan nasional kita dalam beberapa waktu terakhir ini mendapat perhatian khusus dari masyarakat luas, sehubungan dengan diimplementasikannya Kurikulum 2013. Sebagaimana kita ketahui, Kurikulum 2013 mulai diimplementasikan pada tanggal 15 Juli 2013 secara bertahap dan terbatas, yaitu untuk Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X. Sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 juga masih dibatasi pada 6.326 sekolah dari lebih dari 200.000 sekolah yang ada di Indonesia. Bahkan, untuk madrasah yang secara manajemen dan administrasi di bawah Kementerian Agama, pada tahun 2013, belum diterapkan sama sekali.

Mulai tahun pelajaran baru, Juli 2014, Kurikulum 2013 diimplementasikan di Kelas I, Kelas II, kelas IV, Kelas V, Kelas VII, Kelas VIII, Kelas X, dan Kelas XI, di seluruh sekolah/madrasah. Pada bulan Juli 2015 nanti, direncanakan, Kurikulum 2013 sudah diimplementasikan secara menyeluruh di semua kelas, mulai dari Kelas I sampai dengan Kelas XII.

Peran BSNP sebagai lembaga profesional dan mandiri dalam hal ini adalah mengembangkan standar nasional pendidikan. Ada empat standar nasional pendidikan yang telah dikembangkan BSNP dan menjadi landasan dari implementasi Kurikulum 2013. Keempat standar tersebut adalah Standar Kompetensi Lulusan, Standar

Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Selain itu, BSNP juga berperan dalam penilaian buku teks pelajaran. Adapun implementasi Kurikulum 2013 merupakan tugas dan kewenangan dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tidak dipungkiri, meskipun secara konseptual baik dari perspektif filosofis, psikologis, dan pedagogis, Kurikulum 2013 mendapat acungan jempol dari berbagai pihak, dalam implementasinya masih ada kelemahan dan kekurangan. Diantaranya adalah masalah yang terkait dengan pelatihan guru dan pencetakan serta distribusi buku teks pelajaran.

Sebagai masyarakat yang memiliki norma dan kearifan lokal, dengan adanya kelemahan tersebut, mari kita bekerja sama untuk saling memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada. Dalam konteks ini, penulis teringat sebuah wisdom yang menyebutkan, "Lebih baik menyalakan sebatang lilin dalam sebuah kegelapan daripada menyalahkan kegelapan itu sendiri". Semoga, implementasi Kurikulum 2013 menjadi semakin baik dan mampu meningkatkan mutu pendidikan nasional bagi generasi masa depan Indonesia. Amin.



**Lebih baik menyalakan sebatang lilin dalam sebuah kegelapan daripada menyalahkan kegelapan itu sendiri.**

# Ucapan Terimakasih

Seluruh jajaran Ketua, Sekretaris, Anggota dan Staf BSNP periode 2014-2018 Mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota BSNP periode 2009-2013 atas pengabdian, dedikasi, komitmen, dan kontribusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka demi meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Semoga Allah SWT memberikan ganjaran dan imbalan yang berlipat ganda atas pengabdian mereka. Amin.



## Anggota BSNP Periode II 2009-2013

**Berdiri dari Kiri ke kanan :** *Teuku Ramli Zakaria, Furqon, Edy Tri Baskoro, Zaki Baridwan, Jamaris Jamna, Djaali, Weinata Sairin, Gunawan Indrayanto*

**Duduk dari Kiri ke kanan :** *Mungin Eddy Wibowo, Djemari Mardapi, M. Aman Wirakartakusumah, Richardus Eko Indrajit, Farid Anfasa Moeloek*

Halal bi halal BSNP pada tanggal 7 Agustus 2014 di Jakarta. Telah menjadi tradisi BSNP untuk mengadakan halal bi halal setiap tahun dengan mengundang seluruh anggota BSNP periode pertama (2005-2009) dan periode kedua (2009-2013) dan beberapa mitra kerja BSNP.



Anggota BSNP menyanyi bersama dalam acara halal bi halal dengan tujuan untuk meningkatkan rasa persaudaraan, keakraban, dan kekeluargaan di kalangan anggota dan mitra kerja.

Ibu-ibu atau istri dari anggota BSNP periode pertama dan kedua menyanyi bersama dalam acara halal bi hala di Jakarta (7/8/2014). Kekeluargaan, kebersamaan, dan soliditas tertanam kuat melalui halal bi halal yang diadakan setiap tahun.



Suasana rapat koordinasi dengan mitra kerja BSNP yang dihadiri oleh anggota BSNP dan perwakilan dari Puskurbuk, BAN S/M, BAN PNF, Puspendik di ruang rapat BSNP (2/9/2014)





Pertemuan antara BSNP dengan Wakil Menteri Bidang Pendidikan, Kepala Balitbang, dan Staf Ahli Menteri untuk membahas Kurikulum 2013 di Jakarta (26/8/2014). Dari kiri ke kanan, Bambang Suryadi Sekretaris BSNP, Musliar Kasim Wakil Menteri Bidang Pendidikan, Furqon Kepala Balitbang, dan Abdullah Alkaff Staf Ahli Menteri Bidang Organisasi dan Manajemen.

Mohammad Nuh berjabat tangan dan menyampaikan terimakasih kepada anggota BSNP periode kedua (2009-2013) sesuai acara pengukuhan anggota BSNP periode ketiga (2014-2018) pada tanggal 14 Agustus 2014.



Anggota BSNP periode 2014-2018 berpose bersama setelah dikukuhkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Agustus 2014. Dari kiri ke kanan, Nanang Arif Guntoro, Ipung Yuwono, Bambang Suryadi, Kiki Yulianti, Erika Budiarti Laconi, Titi Savitri Prihatiningsih, Khomsiyah, Teuku Ramli Zakaria, Zaki Su'ud, Zainal A. Hasibuan, dan Djoko Luknanto.

Teuku Ramli Zakaria (ketiga dari kiri) menyerahkan berita acara pemilihan Ketua dan Sekretaris BSNP kepada Ketua terpilih Zainal A. Hasibuan (kedua dari kiri) disaksikan oleh Sekretaris terpilih Bambang Suryadi (kiri) dan Dadang Sudiarto Sekretaris Balitbang di ruang rapat Balitbang (14/8/2014).



Suasana rapat pleno perdana BSNP di ruang rapat Balitbang untuk membahas pemilihan Ketua dan Sekretaris BSNP serta rencana kerja BSNP.



Edy Tri Baskoro Ketua BSNP periode 2009-2013 (kanan) memotong tumpeng dengan disaksikan oleh anggota BSNP untuk diserahkan kepada Zainal Arifin Hasibuan Ketua BSNP periode 2014-2018 (kedua dari kiri, berbaju merah) dalam acara serah terima jabatan di kantor BSNP (21/8/2014)

Zainal Arifin Hasibuan (kiri) menerima potongan tumpeng dari Edy Tri Baskoro (kanan) dalam acara serah terima jabatan dari anggota BSNP periode 2009-2013 kepada anggota BSNP periode 2014-2018.





Staf sekretariat dan keuangan BSNP berpose bersama Prof. F.A. Moeloek dan Prof. Richardus Eko Indrajit di ruang sidang BSNP.

Furqon Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kelima dari kiri, berjas hitam) berfoto bersama staf sekretariat dan keuangan BSNP.



Staf sekretariat menyiapkan draf standar dan instrumen validasi di ruang kerja sekretariat BSNP. Keberadaan dan peran tim sekretariat dalam menjalankan kegiatan BSNP sangat penting.



Suasana validasi draf Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di NTT pada tanggal 22-24 Agustus 2014.



Tim ahli dan responden validasi membahas draf Standar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dalam acara validasi di Surabaya pada tanggal 17-19 Agustus 2014.

Pengisian instrumen evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan (sarana dan prasarana, pendidik, dan pembiayaan) di Surabaya (17-19/8/2014)



Kunjungi Website kami di:  
<http://www.bsnp-indonesia.org>

ISSN 0126-4605



9 770126 460552